

Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi (Studi Kasus Di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara)

Fina Indryanti Harahap¹, Susilawati²

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: Finaharahap01@gmail.com, susilawati@uinsu.ac.id

Abstrak: Kebijakan kesehatan masyarakat dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di Gunung Tua Kabupaten Paluta telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional Penelitian merupakan systematic review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten paluta melibatkan bidan tradisional dalam perawatan ibu bersalin dengan membatasi kewenangan regulasi, SKPD yang baik hati mengkoordinir kepala desa atau lurah dengan bidan dalam penanganan kasus. ibu melahirkan di fasilitas kesehatan dan membatasi hak dukun bayi dengan melarang tindakan hukuman. Pemerintah Kabupaten Paluta juga memberikan penyuluhan kepada bidan adat berupa pelatihan kesehatan ibu dan anak serta keikutsertaan dalam Nota Kesepahaman. proses menuju bidan tradisional berdasarkan aspek pengetahuan budaya lokal yang sulit ditinggalkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, kesehatan ibu dan bayi

Abstract: Public health policies to reduce maternal and infant mortality in Gunung Tua, Paluta Regency have been implemented. This study aims to identify and analyze the organization, interpretation, and implementation of these policies. This study uses an analytical descriptive design using a cross sectional approach. This study is a systematic review. The results showed that the Paluta district government involved traditional midwives in maternity care by limiting regulatory authority, the kind SKPD coordinating the village head or lurah with the midwife in handling cases. mothers give birth in health facilities and restrict the rights of traditional birth attendants by prohibiting punitive measures. The Paluta Regency Government also provided counseling to traditional midwives in the form of maternal and child health training and participation in the Memorandum of Understanding. the process towards a traditional midwife based on aspects of local cultural knowledge that are difficult to abandon.

Keyword: Policy Implementation, maternal and infant health

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kesejahteraan masyarakat, karena merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang, pangan dan papan. Sampai saat ini pembangunan kesehatan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara maju dengan infrastruktur yang baik, tingkat ekonomi yang baik dan tingkat pendidikan yang baik. Bahkan, perbaikan masalah kesehatan di Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu ditingkatkan semua faktor pembangunan yang terlibat dalam mencapai pendekatan holistik terhadap pelayanan kesehatan primer (Hardisman, 2011).

Terlepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di beberapa daerah, masih menghadapi berbagai tantangan, meliputi kesenjangan status kesehatan masyarakat di sejumlah daerah, termasuk aspek sosial ekonomi.

Pelaksanaan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Paluta bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, untuk mengoptimalkan peningkatan kesehatan masyarakat, melalui upaya pemberdayaan masyarakat di kabupaten paluta.

Secara sosiologis, implementasi kebijakan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Paluta, salah satunya dipengaruhi oleh kemitraan bidan dukun, terutama dalam proses persalinan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bidan tentang kesehatan mengindikasikan penguatan relasi sosial.

Dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis organisasi, interpretasi, dan penerapan kebijakan kesehatan masyarakat dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi di kabupaten paluta.

Kebijakan kesehatan merupakan bagian dari kebijakan publik (Damopolii, 2016). Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan kebijakan kesehatan yang efektif dan efisien, maka penting dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kesehatan, yaitu pembangunan kesehatan.

Implementasi kebijakan dipandang sebagai sebuah studi yang krusial terutama untuk public administration dan public policy. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya (Edward, 1980).

Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) 2015, target Indonesia adalah menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian balita (AKABA) masing-masing menjadi 102 per100.000 jiwa. (Saputra dkk, 2013).

Menurut Pranata dkk (2011), terdapat upaya pemerintah berupa program yang dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB dari aspek medis serta kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan, antara lain dengan meningkatkan cakupan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional Penelitian merupakan systematic review. Desain *cross sectional* atau dikenal juga dengan potong lintang adalah desain penelitian analitik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dimana variable independent dan dependen diidentifikasi pada satu waktu. Sumber data penelitian ini berasal dari literatur yang diperoleh melalui internet berupa hasil penelitian mahasiswa mengenai implementasi kebijakan Kesehatan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan penelitian ini dianalisis berdasarkan aspek implementasi kebijakan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu organisasi/pengoorganisasian (organization), interpretasi (interpretation), dan penerapan (application).

Pengoorganisasian (Organization)

Hasil penelitian berdasarkan aspek organisasi atau pengoorganisasian (organization) menunjukkan bahwa di Kabupaten Paluta, proses awal penyelenggaraan kebijakan ini dimulai dengan keterlibatan badan internasional UNICEF dalam rangka mengatasi masalah kematian ibu hamil di Kabupaten paluta.

Dukun beranak memiliki peran dalam menunjang keselamatan ibu dan bayi dengan mengantar ibu hamil untuk memeriksakan diri ke bidan, namun untuk aktifitas tradisional seperti ritual “mappasili” 7 bulanan dapat dibantu oleh dukun beranak selama tidak bertentangan dengan aspek kesehatan dan sesuai dengan tradisi setempat.

Kemitraan Bidan dan Dukun (KBD) mengarahkan agar persalinan dapat ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menangani persalinan, namun dukun tetap dilibatkan dalam kegiatan non-medis. Dampak langsung sejak praktik KBD diterapkan tahun 2011, secara statistik, AKI menurun drastis, dimana Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran menjadi 0%.

Pemerintah Daerah Bulukumba memberlakukan hukuman bagi kelahiran di luar fasilitas kesehatan, termasuk hukuman bagi pasien, bidan, dan bidan tradisional yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan belum adanya pendekatan budaya penyambutan tradisional kepada bidan atau bayi di Kabupaten Bulukumba.

Interpretasi (Interpretation)

Pada aspek Interpretasi (Interpretation) menunjukkan bahwa di Kabupaten Paluta terdapat proses pembinaan bagi para dukun beranak dengan memberikan pelatihan tentang kesehatan ibu dan bayi serta secara langsung memberikan nota kesepakatan berupa batasan wewenang dan insentif yang diterima oleh para dukun beranak. Pemerintah Prefektur Takalar juga menawarkan banyak insentif kepada dukun beranak sebagai bentuk pengakuan keberadaan mereka serta insentif untuk mendukung persalinan di fasilitas medis yang unggul.

Upaya penanganan kematian ibu dan bayi telah dilakukan dengan pembentukan kelas ibu hamil yang merupakan kelompok belajar ibu hamil dengan umur kehamilan antara 4 sampai dengan 36 minggu yang dimentori oleh bidan. Upaya ini mendorong ibu hamil untuk menggunakan fasilitas kesehatan. Pendataan masyarakat yang kurang lengkap terutama ibu hamil yang ada di Kabupaten paluta masih menjadi kendala, sehingga masih ada ibu hamil yang melahirkan tanpa menggunakan fasilitas kesehatan yang disediakan Pemerintah Kabupaten paluta.

Penerapan (Application)

Pada aspek penerapan (application), di Kabupaten paluta terdapat prosedur yang dilakukan dalam implementasi kebijakan, mulai dari kegiatan asesmen analisa situasi, monitoring, dan evaluasi. Puskesmas berkoordinasi dengan Lintas Program/Lintas Sektor Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan bidan melakukan pendataan dan pemetaan dukun yang masih aktif memberikan pelayanan melahirkan dan ritual tradisional.

Ada tiga (tiga) periode peran bidan dan bidan tradisional dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, yaitu masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Dalam proses alih peran dan pembagian tugas antara bidan tradisional dan bidan, perlu disepakati mekanisme kerjasama yang akan dibangun di antara mereka. Walaupun mekanismenya sangat bervariasi dari kasus ke kasus, beberapa elemen penting perlu disepakati dan dimasukkan dalam MOU antara bidan tradisional dan bidan, termasuk: informasi dan rujukan untuk ibu hamil, mekanisme rujukan untuk kasus persalinan, mekanisme pembagian biaya untuk persalinan, dan jadwal pertemuan rutin bidan.

Penelitian ini secara garis besar menguraikan 3 (tiga) aspek utama yang dikemukakan Jones (1996), yang relevan dengan situasi yang terjadi di lapangan, sehingga terlihat jelas perbedaan tindakan dari implemementasi kebijakan masing-masing daerah, baik di Kabupaten Takalar maupun di Kabupaten Bulukumba dari sisi pengorganisasian,

interpretasi, dan penerapan.

Secara sosiologis, implementasi kebijakan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Paluta, salah satunya dipengaruhi oleh kemitraan bidan tradisional, terutama dalam proses persalinan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bidan tentang kesehatan mengindikasikan penguatan relasi sosial. Program 5T (Timbang, Tensi, Tablet fe, Timbang ukuran perut, dan Tinggi badan) sangat membantu ibu hamil untuk mengontrol perkembangan kehamilannya. SMS "Bayi Sehat 24 jam" berfungsi sebagai kontrol dan monitoring dalam proses persalinan. Meskipun demikian, secara kultural, konstruksi budaya tradisional, terutama masyarakat bercorak pesisir masih mengakar kuat sehingga konstruksi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi masih lemah. Pijat dukun, jamu tradisional, mitos kehamilan, dan kharismatik tokoh sentral menjadi eksemplar. Relasi sosial antar aktor lokal dan dukungan aktor lokal juga masih lemah.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan terdapat pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten paluta. Hal ini ditandai dengan adanya pelibatan unsur dukun beranak atau bayi yang juga terlibat dalam proses upaya penanganan ibu melahirkan dengan memberikan batasan wewenang sesuai aturan dalam kebijakan daerah Kabupaten paluta. Di Kabupaten Takalar terdapat proses pembinaan bagi para dukun dengan memberikan pelatihan tentang kesehatan ibu dan bayi serta secara langsung memberikan nota kesepakatan berupa batasan wewenang dan insentif yang diterima oleh dukun.

Ada tiga (tiga) periode peran bidan dan bidan tradisional dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, yaitu masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Dalam proses alih peran dan pembagian tugas antara bidan tradisional dan bidan, perlu disepakati mekanisme kerjasama yang akan dibangun di antara mereka. Walaupun mekanismenya sangat bervariasi dari kasus ke kasus, beberapa elemen penting perlu disepakati dan dimasukkan dalam MOU antara bidan tradisional dan bidan, termasuk: informasi dan rujukan untuk ibu hamil, mekanisme rujukan untuk kasus persalinan, mekanisme pembagian biaya untuk persalinan. dan jadwal pertemuan rutin bidan.

BIBLIOGRAFI

- Damopolii, R. V. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu). *Jurnal Politico*, Volume 3 Nomor 1.
- Hapsari, S. K. (2016). Pencegahan Kematian Ibu dan Anak melalui Pendekatan Strategi Komunikasi pada Program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(3).
- Hardisman, H. (2011). Pembangunan Terestegrasi sebagai Pendekatan Pemecahan Masalah Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 5(2), 94-99.
- Pranata, S., Pratiwi, N. L., & Rahanto, S. (2011). Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, gambaran peran kader posyandu dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di kota Manado dan Palangkaraya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 14(2).
- Tahjan, H. (2008), Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : RTH.